



**PENERAPAN KETENTUAN RESIDIV BAGI ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PEMBERATAN
PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang)**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum*

OLEH:

Silvy Handayani
NIM: 2320112022

Pembimbing:

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

PENERAPAN KETENTUAN RESIDIV BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PEMBERATAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang)

Silvy Handayani, 2320112022, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, hlm 125, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya jumlah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residiv) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum, karena hingga saat ini kasus anak yang berstatus residivis tergolong tinggi ditinjau dari 5 tahun terakhir, serta belum adanya pengaturan secara khusus mengenai residivis anak dalam sistem hukum Indonesia membuat dilema dalam penegakan hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan ketentuan residiv terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Padang? (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjadikan status residivis sebagai dasar pemberatan pidana terhadap anak? dan (3) apakah pemberatan pidana terhadap anak residivis telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan residiv terhadap anak, dasar pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dengan hakim dan jaksa anak, serta analisis terhadap putusan perkara anak residivis di Pengadilan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan residiv terhadap anak di Pengadilan Negeri Padang masih mengacu pada KUHP karena belum ada aturan khusus mengenai residiv anak. Dalam praktiknya, hakim tidak menerapkan pemberatan pidana, sebab keputusan lebih diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim dalam menyikapi status residivis juga tetap berfokus pada kondisi pribadi anak, efektivitas pembinaan, serta lingkungan keluarga dan sosial. Meskipun pengulangan dianggap menambah kesalahan, hakim memastikan pidana yang dijatuhkan tetap proporsional dan berorientasi pada perbaikan anak. Pendekatan ini mencerminkan teori gabungan, karena menghubungkan unsur pembalasan dengan tujuan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi. Ketiadaan aturan khusus membuat hakim menyesuaikan ketentuan KUHP dengan prinsip-prinsip UU SPPA, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata memperberat hukuman, melainkan memastikan anak masih memiliki peluang pembinaan yang optimal.

Kata Kunci: *Anak, Residiv, Pemberatan Pidana, Perlindungan Anak*

**THE APPLICATION OF RECIDIVISM PROVISION FOR JUVENILE OFFENDERS
AS A BASIS FOR SENTENCE AGGRAVATION (A Case Study at the Padang District
Court)**

**Silvy Handayani, 2320112022, Postgraduate Program, Faculty of Law,
Andalas University, Page 125, 2026**

ABSTRACT

This research is motivated by the still high number of children who repeat criminal acts (recidivists) in the jurisdiction of the Padang District Court. This phenomenon raises questions regarding the application of the law, because until now the number of children with recidivist status is relatively high in the last 5 years, and the absence of specific regulations regarding child recidivism in the Indonesian legal system creates a dilemma in law enforcement. The formulation of the problem in this research includes: (1) how is the application of the recidivist provisions to children who commit criminal acts in the Padang District Court? (2) how do judges consider recidivist status as a basis for increasing the sentence for children? and (3) is the increase in sentence for recidivist children in accordance with the principles of child protection? The purpose of this research is to determine and analyze the application of the recidivist provisions to children, the basis for judges' considerations, and their conformity with the principle of the best interests of the child. This research uses an empirical legal method with a juridical-sociological approach through interviews with judges and child prosecutors, as well as an analysis of the decisions of cases of recidivist children in the Padang District Court. The research results show that the application of recidivism provisions to children in the Padang District Court still refers to the Criminal Code (KUHP) because there are no specific regulations regarding juvenile recidivism. In practice, judges do not apply increased sentences, as decisions are primarily geared toward the child's best interests. Judges' considerations regarding recidivism status also continue to focus on the child's personal circumstances, the effectiveness of guidance, and the family and social environment. Although repetition is considered to increase culpability, judges ensure that the sentence imposed remains proportional and oriented toward the child's improvement. This approach reflects a combined theory, as it links the element of retribution with the goals of community protection and rehabilitation. The absence of specific regulations forces judges to align the provisions of the Criminal Code with the principles of the Child Protection and Child Protection Law, so that their considerations are not solely focused on increasing sentences but also on ensuring that children still have optimal opportunities for development.

Keywords: Children, Recidivism, Increased Sentences, Child Protection